

FOTO: ANTARA



PEMBUKAAN GAIKINDO JAKARTA AUTO WEEK 2023

Menko Perencanaan Airlangga Hartarto meninjau interior mobil yang dipamerkan dalam Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (10/3). Pameran otomotif yang mengangkat tema Automotive x Lifestyle itu berlangsung hingga 19 Maret 2023.

Pemerintah Bidik Pasar Ekspor Industri Furnitur Makin Luas

Industri furnitur memiliki potensi pasar mencapai sekira USD500 miliar, sedangkan proyeksi potensinya berdasarkan World Furniture Account Federation mencapai kurang lebih USD700 miliar dengan pertumbuhan berkisar 6%-10%.

JAKARTA (IM) - Industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Saat ini, industri furnitur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143 ribu orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114 ribu unit usaha.

Pertumbuhan PDB industri furnitur memiliki pencapaian gemilang pada 2021 sebesar 8,16% dan di 2022 sebesar 0,21% diiringi dengan rata-rata utilisasi yang cenderung stabil. Data terakhir pada Desember 2022 mencatatkan utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16%.

Industri furnitur memiliki potensi pasar mencapai sekira USD500 miliar, sedangkan proyeksi potensinya berdasarkan World Furniture Account Federation mencapai kurang lebih USD700 miliar dengan

pertumbuhan berkisar 6%-10%.

Sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat hingga 77,9%. Nilai ekspor furnitur pada 2021 mencapai USD2,8 miliar atau naik sebesar 33% dibandingkan 2020. Sedangkan pada 2022, ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka USD2,9 miliar. Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri furnitur sebesar USD5 miliar di 2024, sehingga perlu dilakukan beberapa langkah strategis seperti peningkatan ekspor dan substitusi impor. Selain itu, diharapkan juga lebih banyak produk furnitur yang dijual di platform e-commerce Indonesia.

"Saingannya (industri furnitur Indonesia) kuat seperti Tiongkok dan Vietnam. Jangalah dengan mereka. Sky

is the limit untuk industri ini yang merupakan penghasil devisa (bagi Indonesia)," kata Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto ketika memberi sambutan dalam Opening Ceremony Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023, di Jakarta, seperti dikutip dari laman Kemendagri Perencanaan, Jumat (10/3).

Industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan. "Untuk hambatan bahan baku, hal ini (masalah) klasik

yang harus diselesaikan karena itu dibutuhkan UMKM. Kita rapatkan lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diminta oleh Uni Eropa, apalagi sekarang berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa untuk seluruh produk berbasis hutan, baik kelapa sawit, furnitur, kopi, dan lain-lain, semuanya dikejar jejaknya bahwa mereka tidak ingin ini berasal dari hutan ilegal. Sudah dirapatkan dengan Presiden juga bahwa SVLK ditanggung pemerintah, terutama untuk UMKM, dan anggarannya di KLHK. SVLK boleh saja (diterapkan), tapi jangan sampai membebani pengusaha," ujar Airlangga. Lebih jauh Airlangga

mengungkapkan, selain furnitur living, dining, dan craft, ada satu lagi produk industri yang bisa ditarik ke dalam negeri yaitu bed and sheet. Sebab, hal itu akan mendukung industri tekstil nasional, apalagi industri perhotelan mulai bangkit kembali sehingga potensinya sangat besar.

"Tentunya Pemerintah mendorong Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan tahun ini selesai, lalu juga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk dengan Amerika Serikat, targetnya agar rantai pasok industri furnitur dapat terus berjalan," kata Airlangga. • **dro**

ARKO Dirikan Anak Usaha Baru Garap Proyek PLTA

JAKARTA (IM) - PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) melalui perusahaan terkendalanya yakni, PT Sulawesi Hidro Mandiri, telah mendirikan anak usaha baru dengan nama PT Arkora Padalembara Terbarukan (APT).

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pendirian APT tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No. 25 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018148.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023.

"Kegiatan usaha APT adalah pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)," kata Presiden Direktur ARKO, Aldo Artoko, Jumat (10/3).

Adapun, susunan pemegang saham APT yakni, Sulawesi Hidro Mandiri dengan kepemilikan sebesar 99,96% atau Rp2,49 miliar, sedangkan PT Arjuna Hidro menggenggam kepemilikan sebesar 0,04% atau Rp1 juta.

"Pendirian APT tidak menimbulkan dampak yang material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan," kata Aldo. Sebelumnya, ARKO juga telah mendirikan anak usaha di bidang yang sama yakni, Arkora Hydro Pamulihan (AHP). Di mana, Arkora Guna Nergi memegang sebesar 99,96%

saham PT Arkora Hydro Pamulihan atau sebanyak 2.499 lembar saham senilai Rp2,49 miliar. Sementara PT Arjuna Hidro memiliki 0,04% saham AHP senilai Rp1 juta.

Terkait usaha di bidang PLTA tersebut, ARKO juga telah mengakuisisi saham PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH). Akuisisi itu dilakukan melalui dua anak usahanya yakni, Arkora Hidro Tenggara (AHT) dan Arkora Bakti Indonesia (ABI).

Adapun, latar belakang dari transaksi yang dilakukan yakni, AKEH sudah memiliki izin prinsip dan izin lokasi di Kalimantan Barat, yang mempunyai potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala besar dengan kapasitas 50 megawatt (MW). • **hen**

FOTO: ANTARA



PERESMIAN GUDANG KARGO DAN POS DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI

Sejumlah pemangku kepentingan meninjau fasilitas gudang kargo dan pos saat peresmian di Terminal Kargo dan Pos Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (10/3). Gudang kargo dan pos yang dioperasikan PT Jasa Angkasa Semesta (JAS Airport Services) tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan ekspor maupun impor di Bali, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memberikan dukungan untuk pengembangan infrastruktur di bandara itu.



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Usai IPO, Nusantara Sawit Targetkan Laba Rp100 Miliar

JAKARTA (IM) - PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (kode saham: NSSS) resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (10/3) dengan berhasil meraih dana hasil penawaran umum senilai Rp453,1 miliar.

"Harga perdana saham NSSS ini sebesar Rp127 per lembar. Itu berarti dana yang kami himpun melalui IPO saham ini sebesar Rp453,165 miliar," ujar Presiden Direktur NSSS Teguh Patriawan di Main Hall BEI, Jakarta dikutip dari Antara.

Teguh menjelaskan perseroan menawarkan sebanyak 3,5 lembar miliar saham atau 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, dengan harga penawaran Rp127 setiap saham dan mencatatkan oversubscribed sekitar 13,9 kali.

Ia mengungkapkan dana hasil IPO akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru, dan modal kerja entitas anak, dimana dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme

penyertaan modal. Dia melanjutkan PT Borneo Sawit Perdana (BSP) adalah salah satu anak usaha yang akan menerima suntikan dana hasil IPO, dimana sekitar 33 persen untuk belanja modal dalam membangun pabrik kelapa sawit seluas 40 hektare (ha) dan berkapasitas 60 ton tandan buah segar (TBS) per jam, serta fasilitas pendukungnya.

Kemudian, sekitar 9,4 persen untuk pemenuhan modal kerja BSP dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.

NSSS juga menerbitkan sebanyak 1,784 miliar waran seri I, atau sebanyak 8,82 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu waran seri I, dimana setiap pemegang satu waran seri I berhak membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp190 per saham. • **dot**

OJK Perkuat Industri Asuransi

JAKARTA (IM) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan upaya peningkatan kredibilitas industri asuransi nasional sebagai salah satu program kerja prioritas.

Hal itu diwujudkan salah satunya dengan memastikan kesiapan para pelaku industri untuk mengimplementasikan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi pada 1 Januari 2025 mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomyono mengatakan, penerapan PSAK 74 yang diadopsi dari standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Accounting Standard (IFRS) 17 tersebut dapat mengatasi isu *asymmetric information* yang menyulitkan para *stakeholder* terkait, baik konsumen, investor, serta regulator.

"Untuk mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangan, serta kinerja operasional perusahaan asuransi," kata Ogi dalam keterangan resmi, Jumat (10/3).

Menurut Ogi, sektor industri perasuransian memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik sebagai *provider* jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha, maupun sebagai investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pelaku industri asuransi.

Hal itu berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kapasi-

tas pelaku industri asuransi nasional.

Adapun, penerapan PSAK 74 sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menyatakan bahwa, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan, di mana Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Sebagai langkah awal dari peran aktif untuk mendorong penerapan PSAK 74 dimaksud, OJK pada tanggal 31 Oktober 2022 telah membentuk Steering Committee Implementasi PSAK 74 yang diketuai oleh Anggota Dewan Komisiner OJK dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Selain itu, terdapat juga Dewan Standar Akuntansi Syariah, Institut Akuntan Publik Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia, Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Deputi Komisiner Pengawas IKNB OJK, yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Working Group Implementasi PSAK 74.

"Keberadaan Steering Committee ini diharapkan dapat memberikan solusi atau kebijakan yang dibutuhkan, untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pada level teknis operasional," lanjut Ogi. • **pan**

Pupuk Indonesia Jamin Pemenuhan Kuota Pupuk Subsidi

JAKARTA (IM) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin kapasitas produksi yang dimilikinya mampu memenuhi kuota pupuk bersubsidi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah.

SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan, kemampuan produksi pupuk Urea mencapai 8 juta ton lebih sedangkan kebutuhan jumlah pupuk Urea yang di subsidi sebanyak 4,6 juta ton. "Untuk NPK kemampuan kita kurang lebih 3,5 juta ton sedangkan yang di subsidi 3,2 juta ton. Jadi kalau dari segi kemampuan kita untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi cukup," kata Wijaya dilansir dari Antara, Jumat (10/3).

Mengenai kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan petani, Wijaya menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia mendistribusikan pupuk Urea dan NPK subsidi sesuai dengan alokasi yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah untuk masing-masing daerah.

"Alokasi itu tentunya terbatas tidak sesuai dengan keinginan para petani, akibatnya tentu ada orang-orang yang merasa tidak dapat atau tidak kebagian atau kekurangan kebutuhannya," ujarnya.

Kemudian, untuk bisa mendapat pupuk bersubsidi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para petani. Pertama, harus bergabung dalam kelompok tani. Kedua, harus sudah terdaftar dalam Sistem Informasi

Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Aplikasi milik Kementerian tersebut memuat data kelembagaan penyuluhan pertanian, data tenaga penyuluhan dan data kelembagaan petani.

Sedangkan syarat ketiga adalah petani yang maksimal bertani di atas lahan dengan luas maksimal dua hektar. "Hasil pantauan kami ke lapangan bahwa ada petani di desa misalnya kesulitan mencari pupuk atau meminta mau beli pupuk tapi ditolak. Setelah kami cek ke lapangan, seringkali ternyata sebetulnya petani mengeluh itu memang tidak berhak atau tidak tergabung dalam kelompok tani, kan ada kriterianya untuk bisa dapat pupuk bersubsidi," jelas Wijaya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, terdapat perubahan mengenai jenis pupuk yang di bersubsidi dan komoditas yang berhak mendapat pupuk bersubsidi.

Melalui peraturan tersebut, jenis pupuk subsidi yang awalnya terdiri dari lima jenis, kini menjadi 2 jenis yakni hanya Urea dan NPK. Lalu, jumlah komoditas yang berhak mendapat pupuk bersubsidi berkurang dari 72 menjadi 9 komoditas.

"Itu kondisinya yang harus diketahui oleh masyarakat, ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi," ungkapnya. • **dot**